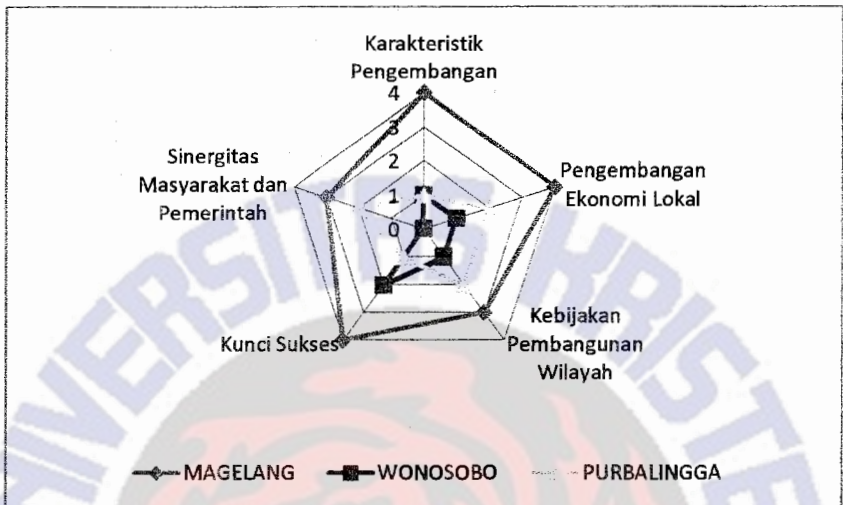


X. PENUTUP

Secara diagramatik kinerja pengembangan kawasan agropolitan di masing-masing kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Secara keseluruhan dari lima kriteria keberhasilan pengembangan yang digunakan terlihat bahwa kinerja pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang adalah yang paling memenuhi kriteria analisis. Sedangkan kinerja pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Wonosobo dan Purbalingga tidak ada satu indikator keberhasilanpun yang mencapai nilai maksimal

A. KESIMPULAN

1. Pengembangan kawasan agropolitan di sekitar STA Sewukan dan Desa Nglumut Kecamatan Srumbung membuahkan cerita sukses yang dapat dijadikan model pengembangan kawasan agropolitan. Keduanya memiliki akses terhadap lahan pertanian dan air, adanya kebijakan yang mendukung diversifikasi produk pertanian, tidak tergantung sepenuhnya

pada keputusan dari pemerintah pusat serta adanya kekuatan komitmen koordinasi.

2. Pengembangan kawasan agropolitan di Kawasan Agropolitan Rojonoto Kabupaten Wonosobo mengalami stagnasi karena :
 - a. *Master plan* kurang membumi, implementasinya berat;
 - b. Implementasi *Master Plan* pengembangan kawasan agropolitan bias infrastruktur, meninggalkan penguatan kelembagaan lokal pengelola, prinsip kemitraan dan pemberdayaan petani lokal;
 - c. Pengembangan kawasan agropolitan tidak tepat sasaran tidak bersifat *bottom up* (kebijakan dari bawah) dan strategi pengembangan bisnis lemah;
 - d. Komitmen implementasi koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan kawasan agropolitan lemah.
3. Pengembangan kawasan agropolitan di Kawasan Agropolitan Bungakondang Kabupaten Purbalingga kurang optimal karena:
 - a. Adanya kegamangan dan kurang jelasnya orientasi strategi pembangunan di Kabupaten Purbalingga : sebagai daerah industri, pariwisata atau menjadi daerah *hinterland* pendukung Kabupaten Banyumas;
 - b. Pengembangan kawasan agropolitan tidak tepat sasaran, inisiatif lokal lemah (kebijakan dari atas) dan jejaring kemitraan juga lemah;
 - c. Komitmen implementasi koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan kawasan agropolitan lemah;
 - d. Dukungan dana dari APBD bagi pengembangan kawasan agropolitan kurang memadai.

4. Evaluasi pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan studi kasus pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang, Wonosobo serta Purbalingga menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan agropolitan kurang berkembang disebabkan oleh:
 - a. Penetapan lokasi yang bersifat *top down*;
 - b. Kurangnya dukungan dana APBD Kabupaten, mengingat basis pengembangan kawasan agropolitan ada di wilayah kabupaten;
 - c. Lemahnya komitmen koordinasi lintas sektoral dan masih menguatnya ego sektoral;
 - d. Kurang dipenuhinya kriteria keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan.

B. REKOMENDASI

1. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Magelang dipandang perlu untuk dilakukannya upaya secara konsisten :
 - a. Kaderisasi pengelola STA Sewukan agar kinerja STA Sewukan yang baik bisa berkesinambungan;
 - b. Peningkatan fasilitasi program FEDEP untuk pemberdayaan usaha tani;
 - c. Pengembangan dan penguatan partisipasi *stake holders* STA (pedagang, penyedia jasa layanan, buruh bongkar, lembaga keuangan mikro dan lain-lain);
 - d. Peningkatan dukungan dari Pemkab Magelang yang memberi ruang bagi pengembangan inisiatif lokal di kawasan STA Sewukan;
 - e. Pengembangan kawasan agropolitan di luar Sewukan (di Kecamatan Dukun, Sawangan, Tegalrejo, Pakis, Ngablak,

- Blabak dan Candimulyo serta kawasan agropolitan Borobudur dan Sumbing) dapat dilakukan mengacu pada cerita sukses pengembangan STA Sewukan dengan berbasiskan potensi kelembagaan dan sosial kapital lokal;
- f. Untuk memicu pertumbuhan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang, hambatan – hambatan birokrasi yang masih ada seperti ego sektoral soal tupoksi pengembangan agropolitan atau minapolitan hendaknya dapat diatasi dengan terobosan birokrasi, kepemimpinan yang visioner dan koordinasi lintas sektoral yang luwes.
2. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Wonosobo, perlu dilakukan upaya serius:
 - a. Meninjau ulang penetapan Kawasan Agropolitan Rojonoto menjadi Kawasan Pengembangan Agropolitan baru yang terpadu yang berpusat di Sawangan;
 - b. Memberi ruang inisiatif lokal dan fasilitasi pengembangan STA komoditas sayuran di Kecamatan Garung, Kertek dan kecamatan lain yang lebih potensial dan siap;
 - c. Penguatan komitmen Pemkab Wonosobo dalam pengembangan Kawasan Agropolitan, di bidang pendanaan, penyusunan RTRW dan pengembangan ekonomi lokal;
 - d. Penguatan koordinasi lintas sektoral dalam bentuk pokja untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan.
 3. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan upaya sistematis:

- a. Meninjau ulang penetapan Kawasan Agropolitan Bungakondang karena tidak memenuhi faktor kunci sukses agropolitan yaitu kemudahan akses pada kegiatan pertanian dan sumberdaya air;
 - b. Memberi ruang inisiatif lokal dan fasilitasi pengembangan STA komoditas sayuran di Kecamatan Bukateja, Karangreja dan kecamatan lain yang lebih potensial dan siap;
 - c. Penguatan komitmen Pemkab Purbalingga dalam pengembangan Kawasan Agropolitan, di bidang pendanaan, penyusunan RTRW, penguatan modal sosial dan pengembangan ekonomi lokal;
 - d. Penguatan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan baru di Kabupaten Purbalingga.
4. Berdasarkan studi kasus pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang, Wonosobo serta Purbalingga maka untuk pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa Tengah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Penetapan lokasi kawasan agropolitan harus berdasarkan kebijakan dari bawah (*bottom up*) dan memperhatikan pemenuhan kriteria keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan ;
 - b. Perlunya peninjauan kembali lokasi kawasan agropolitan yang sudah berjalan tetapi tidak fungsional dan tidak optimal kinerjanya;
 - c. Perlunya penguatan komitmen dan dukungan Bupati dan DPRD dalam pengembangan kawasan agropolitan.